

# POTENSI ZAKAT PERIKANAN LAUT DAN KEMISKINAN DI PESISIR KABUPATEN CIREBON

Eef Saefulloh, M.Ag  
19760312 200312 1003

Program Studi Hukum Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
[eefsae2003@gmail.com](mailto:eefsae2003@gmail.com)

Mohamad Ghazali  
19840121 201503 1005

Program Studi Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
[ghozali.iaincrb@gmail.com](mailto:ghozali.iaincrb@gmail.com)

Abstrak

*Potensi Ikan Laut Tangkapan di Kabuapten Cirebon sangat besar pada angka 30.844 ton dengan hasil tangkapan sebesar 27.545 ton. Namun disisi lain tingkat kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon cukup tinggi yaitu sebesar 14,54 %. Kekuatan Zakat dari sector perikanan laut sebagai ibadah maaliyah ijtimaiyyah dipandang urgen untuk dikelola dalam rangka pengentasan kemiskinan. Perlu ada deskripsi yang riil tentang potensi perikanan laut dan potensi zakatnya. Sehingga pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan komprehensif. Strategi pengelolaan zakat perikanan laut yang tepat guna dan berdaya guna akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif potensi zakat perikanan laut dalam setiap tahunnya mencapai sekitar Rp. 2 (dua) milyar lebih, hal ini didasarkan pada potensi perikanan laut dan hasil tangkapan nelayan di 8 (delapan) kecamatan di wilayah pesisir Kabuapten Cirebon. Strategi pengelolaan yang didasarkan pada kebutuhan para nelayan dan pendampingan khusus untuk meningkatkan taraf hidup menjadi prioritas. Terutama ketergantungan nelayan kepada tengkulak yang cukup tinggi akan dapat ditekan. Sehingga pendapatan nelayan meningkat dan mendorong daya beli dan tarap hidup yang meningkat.*

Kata Kunci: Potensi Zakat, Perikanan Laut, Kemiskinan

## I. PENDAHULUAN

Laut sebagai sumber daya alam merupakan tempat 80 persen kehidupan mahluk hidup. Laut adalah penyedia sumber protein terbesar dimana setiap tahunnya ada sekitar 70 juta ton sampai 75 juta ton ikan yang ditangkap oleh para nelayan di dunia. Sebesar 29 persen dari hasil tangkapan laut dikonsumsi manusia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas mencapai 3,25 juta km<sup>2</sup> sehingga Indonesia disebut sebagai Negara Maritim. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, yaitu sepanjang 81.000 km atau 13,9 persen panjang pantai dunia. Sementara total produksi perikanan tangkap tahun 2017 mencapai 7,67 juta ton, atau setara dengan nilai Rp. 158 triliun. Sebelumnya ditahun 2016 menacapai 6,54 juta ton atau senilai Rp. 121 triliun. Potensi stok ikan wilayah laut Indonesia pada tahun 2015 sekitar 9,93 juta matriks ton, tahun 2016 sekitar 12,5 juta matriks ton, dan tahun 2017 sekitar 14,32 juta matriks ton. (Republika, 11-2018)

Namun disisi lain penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan dan wilayah pesisir yang mencapai 63,47 persen atau 167,6 juta jiwa dari 264 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia sebagian besar masuk kategori miskin yakni 32,14 persen atau sebanyak 83,7 juta jiwa. Data statistik menunjukkan bahwa upah riil harian yang diterima seorang buruh tani dan buruh nelayan hanya sebesar Rp. 30.449,- per hari. Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan upah nominal harian seorang buruh bangunan biasa Rp. 48.301,- per hari. (Biro Pusat Statistik, 2018).

Rendahnya penghasilan nelayan menjadi faktor masih tingginya angka kemiskinan nelayan. Sekitar 16,2 juta nelayan di Indonesia atau sekitar 44 persen dari jumlah nelayan yang mencapai 37 juta jiwa hidup dibawah ambang kemiskinan. Sehingga kesejahteraan nelayan justru sangat minim dan identik dengan kemiskinan (Biro Pusat Statistik, 2018).

Di Kabupaten Cirebon pada kurun tahun 2015-2017 tingkat kemiskinan masih berada diatas rata-rata Nasional dan Provinsi. Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon mencapai 17,83 persen. Sementara Provinsi Jawa Barat sebesar 12,15 persen. Di tingkat nasional kemiskinan mencapai 14,91 persen. (Biro Pusat Statistik, 2018).

Kemiskinan di Kabuapten Cirebon khususnya di wilayah pesisir pantai utara yang meliputi 8 (delapan) kecamatan, dua diantaranya yaitu kecamatan Mundu dan Gebang termasuk dalam sepuluh kecamatan termiskin di Kabupaten Cirebon. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penegentasan kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan potensi perikanan laut. Semakin besar tangkapan laut maka akan semakin meningkat pendapatan dan daya beli masyarakat nelayan. Potensi perikanan laut Kabuapten Cirebon tertinggi kedua setelah Indramayu, yakni sebesar 29 persen dari total hasil tangkapan laut wilayah utara Jawa Barat. Di samping itu potensi Zakat perikanan laut sebagai *ibadah maaliyah ijtimaiyyah* memiliki kedudukan yang urgen dan strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabuapten Cirebon. Kewajiban Zakat perikanan laut ini didasarkan pada pendapat Imam Hambali dan ulama kontemporer Yusuf Qardhawi. (Qardhawi, 1993;235).

Dengan demikian optimalisasi potensi perikanan laut akan diikuti pula dengan potensi zakat perikanan laut yang secara bersamaan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan. Strategi pengelolaan zakat yang tepat guna dan berdaya guna akan mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon.

Dari latar belakang diatas peneliti kemudian menyusun judul penelitian ***Potensi Zakat Perikanan Laut dan Relevansinya dengan Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon.***

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan potensi perikanan laut, potensi zakatnya, strategi pengelolaan zakat, tingkat kemiskinan dan analisi SWOT pengelolaan potensi zakat perikanan laut yang mampu ditangkap di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon yang meliputi 8 (delapan) Kecamatan, yakni Kapetakan, Suranenggala, Gunung Djati, Mundu, Pangenan, Gebang dan Losari. Peneliti dilakukan selama 4 (empat) bulan dimulai dari Bulan Agustus sampai dengan November tahun 2018.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk dapat menguraikan data secara alamiah dan komprehensif. Adapun jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Dengan jenis penelitian ini diharapkan peneliti dapat menggambarkan secara utuh focus penelitian.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi potensi perikanan laut dan potensi zakatnya. Perkembangan nelayan, fasilitas dan kemampuan tangkapnya. Profil kemiskinan masyarakat di pesisir Kabupaten Cirebon dan akar masalahnya. Nilai Zakat perikanan dan Strategi pengelolaannya.

Dalam menemukan dan mengambil data penelitian, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, Observasi atau keterlibatan peneliti karena dalam penelitian kualitatif mutlak dibutuhkan sehingga peneliti dapat mengamati secara seksama focus penelitian secara alamiah. Pengambilan data tidak hanya sekedar wawancara namun data-data dalam bentuk tulisan dan aktifitas riil pun perlu dikemukakan melalui teknik dokumentasi. Studi Kepustakaan juga dilakukan untuk mendalami focus penelitian yang lebih mendalam dan berdasar. Sehingga hasil-hasil penelitian dan teori terkait penelitian dapat dimanfaatkan untuk mengurai focus penelitian.

Penelitian dilakukan di pesisir Kabupaten Cirebon yang meliputi 8 (delapan) kecamatan dengan populasi nelayan sebanyak 17.322 jiwa. Dengan wilayah yang cukup

luas dan populasi nelayan yang sangat banyak peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dengan kedua teknik tersebut peneliti memulai dari pemerintah kecamatan dan desa setempat kemudian meminta identitas dari ketua perhimpunan nelayan, kepala TPI (tempat pelelangan Ikan) dan Ketua Koperasi setempat.

Dalam penelitian kualitatif, instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berusaha untuk menggali, menemukan, memahami, menguji dan menganalisis data data penelitian. Peneliti berupaya untuk independen dan objektif dengan mengemukakan bukti bukti penelitian melalui catatan penelitian, rekaman, video dan foto-foto penelitian.

Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi yang meliputi triangulasi teknik pengumpulan data, sumber data, dan teori. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Potensi Zakat Perikanan Laut di Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon

Potensi perikanan laut Kabupaten Cirebon sangat melimpah dengan panjang pantai sekitar 54 km. Pada tahun 2016 jumlah ikan laut yang dihasilkan dari wilayah utara Jawa Barat mencapai 134.936.97 ton (90.3 persen dari total produksi perikanan laut tangkap Jawa Barat) dengan nilai mencapai Rp. 784.5 milyar. Sementara hasil tangkapan laut wilayah selatan Jawa Barat hanya mencapai 14.552 ton (9.7 persen dari total produksi perikanan laut tangkap Jawa Barat) dengan nilai mencapai Rp. 106.5 milyar. Di pesisir Kabupaten Cirebon pada tahun 2016 hasil tangkapan laut mencapai 27.545 ton. Dan potensi ikan laut tangkapan sebesar 30.844 ton di tahun 2017 (Dinas Perikanan Jawa Barat, 2017).

Tabel 1  
Potensi Ikan Laut Tangkapan  
Di wilayah pesisir utara Jawa Barat (ton/tahun) 2017

| Kabuapaten/Kota    | Pelagis Besar | Pelagis Kecil | Demersal | Ikan Karang | Jumlah |
|--------------------|---------------|---------------|----------|-------------|--------|
| Bekasi             | 8875          | 6179          | 549      | 446         | 16049  |
| Kerawang           | 6220          | 8284          | 4195     | 348         | 19047  |
| Subang             | 8213          | 13723         | 4947     | 407         | 27290  |
| Indramayu          | 12517         | 16241         | 8206     | 660         | 37624  |
| Kabuapaten Cirebon | 8627          | 15425         | 6261     | 531         | 30844  |
| Kota Cirebon       | 844           | 7664          | 663      | 53          | 9224   |
| Jumlah             | 45296         | 67516         | 24821    | 2445        | 140078 |

Berdasarkan ikan laut tangkapan potensi tangkapan pada tahun 2018 di wilayah utara Jawa Barat Kabupaten Indramyu menempati urutan pertama sebesar 37.624 ton. Sementara Kabupaten Cirebon diurutan kedua sebanyak 30.844 ton dari total ikan laut tangkapan di wilayah utara Jawa Barat.

Adapun jumlah nelayan yang berada di wilayah pesisir Kabuapten Cirebon yang meliputi 8 (delapan) kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2  
Jumlah Nelayan di Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon Tahun 2017

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Nelayan |
|----|----------------|----------------|
| 1  | Kapetakan      | 912            |
| 2  | Suranenggala   | 1822           |
| 3  | Gunungjati     | 4587           |

|   |              |       |
|---|--------------|-------|
| 4 | Mundu        | 2320  |
| 5 | Astanajapura | 1280  |
| 6 | Pangenan     | 2200  |
| 7 | Gebang       | 3532  |
| 8 | Losari       | 1276  |
|   |              | 17322 |

Dari data tersebut kecamatan Gunungjati memiliki jumlah nelayan terbanyak di Kabupaten Cirebon. Diurutan kedua ada kecamatan Gebang.

Sementara jumlah kapal yang digunakan para nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon tidak sebanyak jumlah nelayan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3  
Jumlah Kapal Nelayan di Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon Tahun 2017

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Kapal |
|----|----------------|--------------|
| 1  | Kapetakan      | 178          |
| 2  | Suranenggala   | 342          |
| 3  | Gunungjati     | 1543         |
| 4  | Mundu          | 976          |
| 5  | Astanajapura   | 1280         |
| 6  | Pangenan       | 324          |
| 7  | Gebang         | 1653         |
| 8  | Losari         | 785          |
|    |                | 7081         |

Tempat Pelelangan Ikan atau di singkat TPI di Kabupaten Cirebon berjumlah 8 (delapan) TPI, namun yang aktif hanya ada 2 (dua) TPI saja, yaitu TPI Bondet dan TPI KPL Sendi Jaya. Berikut daftar TPI di Kabupaten Cirebon:

Tabel 4  
Daftar TPI di Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon Tahun 2017

| No | TPI                | Kecamatan    |
|----|--------------------|--------------|
| 1  | TPI KPL Sendi Jaya | Suranenggala |
| 2  | TPI Bondet         | Gunungjati   |
| 3  | TPI Condong        | Gunungjati   |
| 4  | TPI Bandengan      | Mundu        |
| 5  | TPI Ender          | Pangenan     |
| 6  | TPI Gebang         | Gebang       |
| 7  | TPI Kalipasung     | Gebang       |
| 8  | TPI Ambulu         | Losari       |

Para nelayan sementara ini melakukan jual beli ikan secara langsung dengan pelanggan atau bakul atau tengkulak. Sehingga TPI yang sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Cirebon banyak yang tidak berfungsi. Di Desa Ambulu misalnya, ada 250 nelayan dan semua nelayan memiliki pinjaman kepada tengkulak. Kondisi ini membuat nelayan tidak dapat menjual hasil tangkapannya di TPI. Begitu juga nelayan di lingkungan TPI Ender dari 200 an nelayan yang ada semua tergantung pada tengkulak.

Hasil tangkapan nelayan sebenarnya cukup besar dengan perahu dibawah 5 GT yang terdiri dari 3 sampai 4 orang ABK mampu menangkap ikan sebanyak 200 kg sampai 500 kg. Ikan tersebut dijual dengan harga yang bervariasi yang paling murah di jual Rp. 3.000 ribu /kg dengan demikian setiap orangnya akan mendapatkan sekitar Rp. 200.000 sampai Rp. 500.000. Berikut ikan laut tangkapan di pesisir Kabupaten Cirebon:

Tabel 5

Jumlah ikan laut tangkapan di Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon Tahun 2017

| No | Nama Kecamatan | Ikan Tangkapan |
|----|----------------|----------------|
| 1  | Kapetakan      | 688            |
| 2  | Suranenggala   | 1284           |
| 3  | Gunungjati     | 6008           |
| 4  | Mundu          | 3728           |
| 5  | Astanajapura   | 4928           |
| 6  | Pangenan       | 1296           |
| 7  | Gebang         | 6492           |
| 8  | Losari         | 3124           |
|    |                | 27545          |

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa potensi perikanan laut di pesisir Kabupaten Cirebon sangat melimpah. Di tingkat provinsi potensi ikan laut tangkapan berada di posisi kedua setelah Kabupaten Indramayu. Potensi ikan laut tangkapan ini tentu beriringan dengan potensi zakat perikanan laut. Dengan berdasarkan pendapat Imam Hambali zakat perikanan laut sebesar 2,5 persen. Potensi zakat perikanan laut berdasarkan ikan laut tangkapan pada tahun 2017 sebesar 688,7 ton dapat digambarkan sebagai berikut;

Tabel 6

Potensi Zakat Perikanan Laut di Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon

| NO | Nama Kecamatan | Ikan Laut Tangkapan | Potensi Zakat (2.5%) |
|----|----------------|---------------------|----------------------|
| 1  | Kapetakan      | 688                 | 17,2                 |
| 2  | Suranenggala   | 1284                | 32,1                 |
| 3  | Gunungjati     | 6008                | 150,2                |
| 4  | Mundu          | 3728                | 93,2                 |
| 5  | Astanajapura   | 4928                | 123,2                |
| 6  | Pangenan       | 1296                | 32,4                 |
| 7  | Gebang         | 6492                | 162,3                |
| 8  | Losari         | 3124                | 78,1                 |
|    |                | 27545               | 688,7                |

Hasil tangkapan ikan laut nelayan sebesar 27.545 ton pada tahun 2017 dengan potensi zakat perikanan laut sebesar 688,7 ton jika dinilai dengan harga ikan per kilogramnya yang berkisar Rp. 3000 sampai dengan Rp 4000 sehingga nilai rupiah zakat mencapai Rp. 2.754.800.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Potensi zakat perikanan laut tersebut akan bertambah seiring dengan meningkatkannya hasil ikan laut tangkapan.

### 3.2 Deskripsi Kemiskinan di Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon

Tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Cirebon cukup mengkhawatirkan berada pada posisi ke empat dari bawah, yaitu sebesar 13 persen. Sebelumnya pada tahun 2015 kemiskinan di Kabupaten Cirebon sebesar 14 persen dan berada posisi ketiga dari bawah setelah Indramayu dan Majalengka. Namun jika ditinjau lebih spesifik kemiskinan di kabupaten Cirebon bisa mencapai angka 40 persen. Terdiri dari kategori miskin, sangat miskin dan rentan miskin. Adapun angka 13 persen adalah kategori sangat miskin.

Terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yang dinyatakan termiskin di Kabupaten Cirebon. Ke-10 (sepuluh) kecamatan tersebut adalah kecamatan Sumber, Dukupuntang, Plumbon, Waled, Greged, Babakan, Gegesik, Mundu, Gebang, dan Losari. Tiga kecamatan terakhir

adalah di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon. Nelayan pada dasarnya rata rata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Namun hal ini tergantung dari skala kemampuan sarana dan prasarana sebagai nelayan. Nelayan yang memiliki modal besar dapat mengais lebih banyak tangkapan laut sedangkan yang hanya bermodalkan seadanya hasil tangkapannya terbatas. Pola hidup dan gaya hidup masyarakat nelayan juga rentan terjadi kemiskinan.

Tabel 7

Kecamatan, Jumlah Desa, dan Luas Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon

| No | Kecamatan    | Jumlah Desa | Luas WilayahAdministrasi (km2) |
|----|--------------|-------------|--------------------------------|
| 1. | Losari       | 9           | 39,07                          |
| 2. | Gebang       | 13          | 31,68                          |
| 3. | Astanajapura | 11          | 25,47                          |
| 4. | Pangenan     | 9           | 30,54                          |
| 5. | Mundu        | 12          | 25,58                          |
| 6. | Gunungjati   | 15          | 20,55                          |
| 7. | Kapetakan    | 9           | 60,20                          |
| 8. | Suranenggala | 9           | 22,98                          |
|    |              | 87          | 256,07 km2                     |

Untuk wilayah pesisir kabupaten Cirebon meliputi seluruh 8 (delapan) wilayah kecamatan dari 40 kecamatan di Kabuapten Cirebon dengan jumlah Desa 87 dengan luas 256,07 km2 atau sekitar 25.9 persen dari luas wilayah kabupaten Cirebon yang mencapai 990.4 km2.

Tabel 8

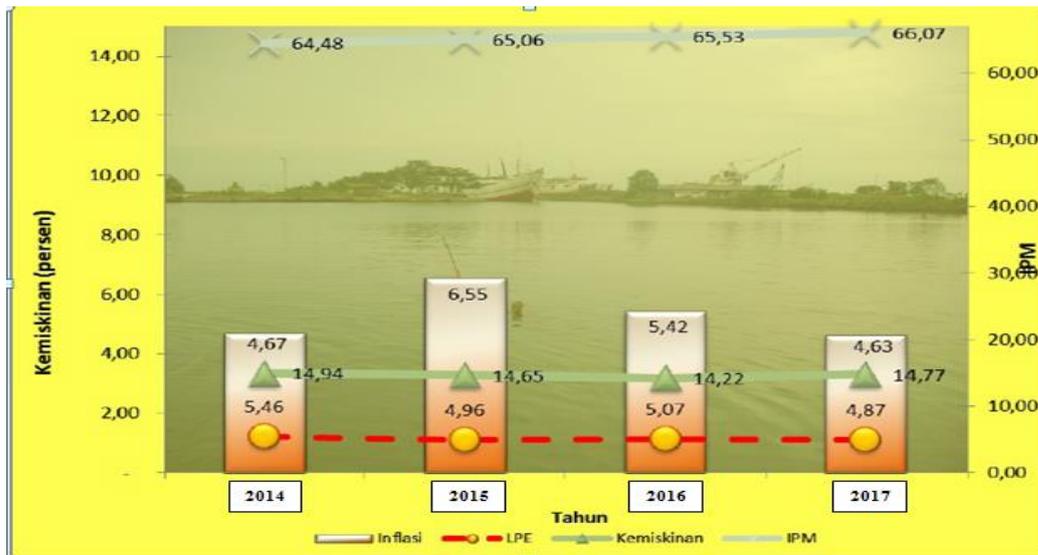
Jumlah Penduduk di Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon

| Kecamatan        | Jumlah Penduduk |           |                 |
|------------------|-----------------|-----------|-----------------|
|                  | Laki-laki       | Perempuan | Jumlah Penduduk |
| 01. Losari       | 30,186          | 28,901    | 59,087          |
| 02. Gebang       | 32,074          | 31,347    | 63,421          |
| 03. Astanajapura | 40,162          | 30,099    | 70,261          |
| 04. Pangenan     | 22,975          | 21,866    | 44,841          |
| 05. Mundu        | 36,520          | 33,998    | 70,518          |
| 06. Gunungjati   | 37,189          | 36,858    | 74,047          |
| 07. Kapetakan    | 28,629          | 27,724    | 56,353          |
| 08. Suranenggala | 21,789          | 21,311    | 43,100          |
| <b>Jumlah</b>    | 249,524         | 232,104   | 481,628         |

(BPS Kabupaten Cirebon, 2017)

Tabel 9

Gambar Laju Pertumbuhan PDRB , Kemiskinan, IPM dan Inflasi Kabupaten Cirebon, Tahun 2014-2017



Dari Gambar Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon berfluktuatif sejak Tahun 2014 –2017, namun di Tahun 2015 mengalami perlambatan sebesar 4,96 persen, karena adanya kenaikan BBM di Bulan Juni 2015 sehingga inflasi sebesar 6,55 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,67 persen. Kemiskinan trendnya menurun. Hal ini disebabkan PDRB besar namun masyarakat tidak menikmati, masyarakat kurang mempunyai akses terhadap faktor produksi karena akses terhadap faktor produksiminim maka perolehan balas jasa faktor produksi juga minimal. Mengapa balas jasa minimal karena sumberdaya manusia yang tidak atau belum tamat sekolah dasar dan lapangan kerja yang tersedia hanyalah sebagai pekerja-pekerjakasar dengan pendapatan yang kurang memadai misalnya buruh tani dan pekerja industri.

Tahun 2015 indeks Kesehatan berupa angka harapan hidup di Kabupaten Cirebon tercatat sekitar 71,38 tahun. Angka tersebut lebih rendah dari angka Jawa Barat 72,41 tahun. Indeks Pendidikan yang meliputi komponen rata-rata harapan lama sekolah sebesar 11,79 tahun dimana sebelumnya 11,60 tahun. Dan komponen rata rata lama sekolah 6,32 tahun lebih baik dari tahun sebelumnya 6,31 tahun. Namun masih rendah disbanding angka Jawa Barat 7, 86 tahun. Daya beli penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 sekitar 9.261 ribu rupiah. Masih lebih rendah dengan angka Jawa Barat 9.778 ribu rupiah. IPM kabupaten Cirebon tahun 2015 sebesar 66,07 dari sebelumnya 65,53. Namun masih berada diperingkat 19 dari 27 Kabuapten/Kota di Jawa Barat.

Tabel 10

Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon

| Kecamatan        | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Miskin |
|------------------|-----------------|------------------------|
| 01. Losari       | 59,087          | 8450                   |
| 02. Gebang       | 63,421          | 9660                   |
| 03. Astanajapura | 70,261          | 10188                  |
| 04. Pangenan     | 44,841          | 6413                   |

|                  |                |              |
|------------------|----------------|--------------|
| 05. Mundu        | 70,518         | 10648        |
| 06. Gunungjati   | 74,047         | 10737        |
| 07. Kapetakan    | 56,353         | 8019         |
| 08. Suranenggala | 43,100         | 6077         |
| <b>Jumlah</b>    | <b>481,628</b> | <b>70192</b> |

Dari table diatas dapat dilihat jumlah kemiskinan diwilayah pesisir Kabupaten Cirebon sebanyak 70129 jiwa berada dibawah kemiskinan Kabupaten Cirebon atau sekitar 14,54 % dari jumlah penduduk yang berada di wilayah pesisir kabupaten Cirebon.

Definisi kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup.

Kemiskinan masyarakat pesisir sebagian besar termasuk kemiskinan relative karena dipengaruhi oleh waktu dan situasi tertentu, termasuk pola hidup dan gaya hidup. Kemiskinan masyarakat pesisir Kabupaten Cirebon dapat deskripsikan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Kekurangan materi karena kelangkaan barang dan pelayanan yang meliputi kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan.
- b. Belum terpenuhi kebutuhan sosial, termasuk pendidikan dan informasi. Keadaan ini membuat masyarakat memiliki ketergantungan dan ketidak mampuan berpartisipasi.
- c. Penghasilan dan pendapatan yang belum memadai. Kondisi ini membuat mereka tidak memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Cirebon antara lain:

- a. Materialistik sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari masyarakat;
- b. Pendidikan yang masih rendah sehingga tidak banyak pilihan lapangan pekerjaan;
- c. Pola hidup masyarakat atau sub-budaya (*sub cultural*) yang berlaku di lingkungan sekitar pesisir;
- d. Agensi eksternal sebagai akibat dari aksi masyarakat lain seperti penggunaan penangkap ikan yang merugikan nelayan lain;

### **3.3 Strategi Pengelolaan Potensi Zakat Perikanan Laut yang Relevan dengan Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Kabuapten Cirebon**

Strategi pengelolaan potensi Zakat perikanan laut perlu melibatkan lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Begitu juga peran lembaga zakat baik yang berafiliasi dengan pemerintah atau swasta. Peran pemerintah pusat, provinsi dan pemda Kabuapten Cirebon juga tentu sangat urgen untuk membuat regulasi maupun bantuan finansial. Disamping itu juga menguatkan struktur jaringan Nelayan dan koperasi nelayan.

Hasil laut yang melimpah berdampak signifikan terhadap potensi Zakat perikanan laut yang akan dihasilkan. Pengelolaan zakat hasil laut menjadi penting dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir. Dalam pelaksanaannya pengelolaan potensi Zakat perikanan Laut dititik beratkan pada program-program yang meliputi:

- a. Penyadaran Muzakki dan Mustahik

Penyadaran akan kewajiban zakat perikanan laut perlu dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan. Begitu juga dengan para mustahik perlu penyadaran tentang analisis kebutuhan yang tidak didasarkan pada keinginan. Sehingga pemenuhan kebutuhan dapat seimbangan dengan daya beli dan pendapatan.

b. Menyediakan Modal Bagi Para Nelayan

Modal nelayan cukup besar dari mulai bahan bakau dan perbekalan termasuk perbaikan kapal dan alat tangkap. Ketersediaan modal yang memenuhi kebutuhan nelayan dengan memenuhi rasa keadilan dan pemerataan distribusi pendapatan dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Selama ini ketergantungan nelayan terhadap tengkulak masih sangat tinggi.

c. Memberikan Pelatihan Berkelanjutan

Dengan melihat masyarakat pesisir yang sangat tergantung pada sumber daya laut perlu dilakukan pelatihan khusus seperti pemahaman terhadap cuaca, pemeliharaan kapal dan alat tangkap, cara penangkapan ikan yang aman dan menjaga biota laut sehingga ketersediaan ikan lestari, pengolahan ikan hasil laut yang dapat meningkatkan nilai jual. Disamping itu penguatan akses pasar dan pemasarannya perlu diperkuat.

d. Peningkatan Partisipasi Perempuan

Kegiatan penangkapan ikan lebih banyak melibatkan kaum laki-laki. Sementara kaum perempuan hanya sebatas menunggu hasil tangkapan dan menjualnya. Kaum perempuan dapat diberdayakan melalui home industry pengolahan ikan laut. Hal ini dapat dilakukan oleh pengelola zakat dengan mendorong ekonomi kreatif yang saat ini masih pada pengolahan ikan asinan.

### **3.4 Analisi SWOT Pengelolaan Potensi Zakat Perikanan Laut yang Relevan dengan Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon**

#### **3.4.1 Kekuatan (*Strengths*)**

Kekuatan yang dimiliki adalah besarnya potensi ikan laut tangkapan sebesar 30.844 ton dengan hasil tangkapan mencapai 27.545 ton, sehingga potensi zakat perikanan laut pun besar, jumlah nelayan yang mencapai 17.322 orang dan jumlah kapal yang memadai sebanyak 7.081 terdiri dari kapal kecil dan besar, ketersediaan BBM yang mencukupi kebutuhan nelayan, jumlah TPI yang cukup sebanyak 11 TPI, 8 TPI masih berdiri dan sebagian telah direnovasi, komunitas nelayan dan koperasi nelayan yang sudah terbentuk, pabrik produksi olahan ikan yang cukup banyak, banyaknya para pembeli yang mampu dan dapat menampung hasil tangkapan ikan laut nelayan.

#### **3.4.2 Kelemahan (*weaknesses*)**

Kelemahan yang ada adalah tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir kabupaten Cirebon yang mencapai 14,54%, sungai-sungai sebagai sarana transportasi banyak yang dangkal sehingga sulit bagi nelayan untuk merapat, modal yang terbatas, ketergantungan modal sebagian besar nelayan terhadap tengkulak, alat tangkap yang masih sederhana, tempat pengisian bahan bakar yang terbatas hanya ada di TPI gebang, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, pemahaman dan kesadaran zakat yang masih rendah, keberadaan komunitas nelayan dan koperasi nelayan yang tidak berfungsi, masih sedikit lembaga keuangan dan lembaga social/zakat yang peduli.

#### **3.4.3 Peluang (*oppurtunitie*)**

Peluang yang ada adalah kemauan masyarakat nelayan yang kuat untuk tidak tergantung pada tengkulak, dukungan yang kuat dari pemerintah dengan pembangunan TPI yang representative, beberapa lembaga keuangan dan lembaga social/zakat yang siap membantu, seperti BRI di Pasar Gebang.

#### **3.4.4 Ancaman (*threats*)**

Ancaman yang dihadapi adalah waktu atau cuaca yang tidak dapat diprediksi, seperti saat ini nelayan segan untuk melaut karena angin Kumbang. Di samping itu pola dan gaya hidup atau prilaku lingkungan juga sangat mempengaruhi. Masih banyaknya nelayan yang memiliki pinjaman kepada tengkulak.

## **IV. SIMPULAN**

Hasil perikanan laut di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon sangat melimpah mencapai 27.545,30 ton dengan potensi Zakat sebesar Rp. 2.754.800.000. Tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon yang mencapai 14,54 % dari jumlah penduduk yang berada di wilayah pesisir atau sebesar 70.192 menjadi masalah besar yang perlu diselesaikan. Namun dengan strategi yang tepat guna dan berdaya guna dalam mengelola potensi zakat perikanan laut kemiskinan tersebut dapat dikurangi dan dientaskan secara bertahap. Dengan melihat kekuatan dan peluang yang ada, masalah kelemahan dan ancaman dalam pengelolaan potensi Zakat perikanan laut kemungkinan bisa diatasi. Harapannya para nelayan tidak lagi tergantung pada tengkulak dan dapat menjual hasil tangkapan dengan harga pasar. Daya beli dan taraf hidup nelayan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan nelayan.

## **UCAPAN TERIMAKA SIH**

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Kementerian Agama RI melalui Kasie Penelitian dan Pengelolaan HAKI penelitian ini dapat dibiayai oleh DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak, yaitu KESBANGPOLIMAS Kabupaten Cirebon, pemerintah Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunungjati, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang, dan Losari, semua pemerintahan Desa, para ketua nelayan, ketua TPI, dan ketua koperasi nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ahmad, Zainal Abidin, 1979, *Dasar-Sasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Ali, Nurdin Mhd, 2006, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Al-Ba`ly, Mahmud, Abdul Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Al-Qasim, Abu ‘Ubaid al-Qasim, *Al Amwal : Ensiklopedia Keuangan Publik*, 2009. Jakarta: GIP
- Al-Zuhayly, Wahbah. 1997. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Azizi, Qodri, 2004, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Membangun prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Bambang Rudito dan Arif Budiman, 2003, *Metode dan Teknik Pengolahan Community Development*, Jakarta: ICSD (Indonesia Center of Sustainable Development)
- Daud, Muhamad Ali, 1989, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : UI Press
- David C. Korten, 2002, *Menuju Abad ke – 21; Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2005, *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Dirjen Kelautan.
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2006, *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Dirjen Kelautan.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama, 1985, *Ilmu Fiqh Jilid I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN)
- Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta
- , 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Rajawali Press
- , 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Mannan, Abdul, 1993, *Ekonomi Islam: Teori dan praktek dasar-dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf
- Ghozali, Syukri, dkk. 1997. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyeksi Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf
- Inoed, Amiruddin Inoed, dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar
- Isbandi Rukminto Adi , 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas*, Jakarta: FISIP UI Press
- Jemes Midgley, 2005, *Pembangunan Sosial; Perfektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam
- Kusnadi, 2008, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta: LKiS

———, 2009, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Latief, Moh. Rowi, Robith A. Shomad. 1987. *Tuntunan Zakat Praktis*. Surabaya: Indah, 1987

Nurhayat, Sri dan Wasilah, 2011, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, 2011. Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 11.

Satria, Arif. Dkk, 2002, *Menuju Desentralisasi Kelautan*, Jakarta, Cidesindo

Shihab, Quraish, 1992, *Membumikan Al-Qur'ann*, Bandung : Mizan

United Nations, 1971, "Sosial Policy and Planning in National Development", in *International Sosial Development Review*

Usman, Suparman, 2002, *Hukum Islam Azas-azas Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama

### **e-Jurnal**

Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.1 Mei 2017, oleh Muhajirin; Potensi dan Kontribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Peningkatan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Kasus di Baznas Kota Bogor)

Jurnal Ekonomi dan keuangan vol. 1 No. 1 Desember 2012, oleh Amalia dan Kasyful mahalli; Potensi dan peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan di kota medan

Jurnal Asas vol. 4 No.2 tahun 2012, Oleh Mardhiyah hayati; peran pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat dalam rangka usaha penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendidikan di indonesia

### **Internet:**

Pembangunan Sosial, dalam Wikipedia.com

Kemiskinan, dalam Wikipedia.com

Gunawan W, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, dalam [www.depsos.go.id](http://www.depsos.go.id)

Hamonangan Ritonga, 2010, dalam [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.kabcirebon.go.id](http://www.kabcirebon.go.id)

### **Makalah dan Undang-Undang:**

Paulus Wirutomo, 2010, *Pembangunan Berbasis Nilai*, disampaikan pada saat Dies Natalis FISIP UI

Undang-Undang No.17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

